

STABILITAS INFLASI

DAN

IMPLIKASINYA

TERHADAP DAYA BELI RUMAH TANGGA
DI INDONESIA



Oleh:

RUDY C TARUMINGKENG

Rudy C Tarumingkeng: **Stabilitas Inflasi dan Implikasinya terhadap
Daya Beli Rumah Tangga di Indonesia**

Oleh:

Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Chairman. Board of Professors, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Chairman, Academic Senate, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyc75@gmail.com

27 March 2026

STABILITAS INFLASI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP DAYA BELI RUMAH TANGGA DI INDONESIA

Abstrak

Makalah ini membahas hubungan antara stabilitas inflasi dan daya beli rumah tangga di Indonesia dalam kerangka makroekonomi yang sekaligus relevan bagi kebijakan publik. Tema ini penting karena konsumsi rumah tangga masih menjadi komponen terbesar dalam pembentukan produk domestik bruto Indonesia. Data BPS menunjukkan bahwa pada 2025, konsumsi rumah tangga menyumbang sekitar 53,88 persen terhadap PDB dan tumbuh 4,95 persen, sementara ekonomi Indonesia secara keseluruhan tumbuh 5,11 persen. Dalam konteks tersebut, kestabilan harga bukan sekadar sasaran teknokratis bank sentral, melainkan prasyarat bagi keberlanjutan konsumsi, kestabilan sosial, dan perlindungan kesejahteraan keluarga. Sasaran inflasi Indonesia pada 2025 dan 2026 ditetapkan sebesar $2,5 \pm 1$ persen; inflasi aktual 2025 tercatat 2,92 persen, yang berarti masih berada dalam kisaran sasaran. Namun, pada Februari 2026 inflasi tahunan meningkat menjadi 4,76 persen, terutama dipengaruhi faktor temporer berupa efek basis dari normalisasi tarif listrik dan kenaikan harga emas, sementara inflasi inti tetap lebih terkendali pada 2,63 persen dan inflasi tahun kalender baru 0,53 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pembacaan atas inflasi harus dibedakan antara gejolak sesaat dan tekanan yang benar-benar persisten. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Makalah ini berargumen bahwa stabilitas inflasi berimplikasi langsung pada daya beli melalui lima saluran utama: perubahan harga kebutuhan pokok, penyesuaian upah dan pendapatan nominal, pembentukan ekspektasi

rumah tangga, biaya kredit dan cicilan, serta kerentanan yang berbeda menurut kelompok sosial-ekonomi. Rumah tangga miskin dan rentan cenderung paling terpukul oleh inflasi pangan, sedangkan kelas menengah menghadapi erosi kemampuan konsumsi riil ketika pertumbuhan pendapatan tidak cukup kuat. Laporan World Bank menunjukkan bahwa pada periode 2019–2024, pertumbuhan konsumsi riil kelas menengah Indonesia hanya sekitar 1,3 persen per tahun, lebih lambat dibanding kelompok termiskin maupun terkaya. Dengan demikian, inflasi yang tampak “moderat” secara agregat belum tentu ringan bagi seluruh rumah tangga. Dalam perspektif kebijakan, pengendalian inflasi perlu dipadukan dengan penguatan pasokan pangan, efisiensi logistik, perlindungan sosial yang adaptif, dan penciptaan pekerjaan berkualitas agar stabilitas harga sungguh-sungguh berubah menjadi perlindungan daya beli.

Kata Kunci

stabilitas inflasi; daya beli; rumah tangga; konsumsi; Indonesia; inflasi pangan; kebijakan moneter; kesejahteraan

1. Pendahuluan

Di dalam ekonomi modern, inflasi bukan hanya istilah statistik yang muncul setiap bulan dalam rilis angka indeks harga konsumen. Inflasi adalah pengalaman keseharian masyarakat. Ia hadir ketika harga beras naik, tarif transportasi bertambah, minyak goreng menjadi lebih mahal, atau biaya listrik menekan anggaran keluarga. Karena itu, pembicaraan mengenai stabilitas inflasi pada akhirnya adalah pembicaraan mengenai stabilitas hidup rumah tangga. Bagi negara seperti Indonesia, isu ini menjadi lebih penting lagi karena konsumsi rumah tangga merupakan penopang terbesar kegiatan ekonomi nasional. Pada 2025, konsumsi rumah tangga masih berkontribusi sekitar 53,88 persen terhadap PDB nasional dan tumbuh 4,95 persen, sementara ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen. Artinya, ketahanan konsumsi masyarakat tidak dapat dipisahkan dari

kestabilan ekonomi nasional secara keseluruhan. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Dari sudut pandang kebijakan, inflasi yang rendah dan stabil menciptakan lingkungan yang lebih dapat diprediksi bagi rumah tangga, pelaku usaha, dan pemerintah. Rumah tangga dapat menyusun anggaran lebih rasional; dunia usaha dapat merencanakan investasi dan produksi dengan ketidakpastian yang lebih kecil; sementara pemerintah dapat menjaga efektivitas belanja sosial dan pembangunan. Sebaliknya, inflasi yang bergejolak menimbulkan distorsi. Pendapatan nominal yang tampak naik bisa kehilangan nilai riilnya. Tabungan keluarga yang tidak tumbuh secepat harga akan tergerus. Bahkan, bantuan sosial yang nilainya tetap dapat menjadi kurang memadai ketika harga pangan melonjak. Dalam pengertian inilah stabilitas inflasi merupakan bentuk perlindungan tidak langsung terhadap kesejahteraan warga. ([Bank Indonesia](#))

Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan capaian yang cukup baik dalam menjaga inflasi agar kembali ke kisaran sasaran setelah tekanan besar pada 2022. Berdasarkan data Bank Indonesia, inflasi aktual Indonesia tercatat 5,51 persen pada 2022, lalu turun menjadi 2,61 persen pada 2023, 1,57 persen pada 2024, dan 2,92 persen pada 2025. Sementara itu, sasaran inflasi untuk 2025 dan 2026 ditetapkan sebesar $2,5 \pm 1$ persen. Trajektori ini memperlihatkan keberhasilan relatif dalam memulihkan stabilitas harga. Akan tetapi, perkembangan Februari 2026 mengingatkan bahwa stabilitas inflasi tetap rapuh terhadap kejutan. Inflasi tahunan meningkat menjadi 4,76 persen, walaupun Bank Indonesia menekankan bahwa lonjakan ini terutama dipengaruhi faktor temporer, khususnya efek basis dari diskon tarif listrik rumah tangga pada Januari–Februari 2025. Inflasi inti sendiri tetap lebih terjaga pada 2,63 persen. ([Bank Indonesia](#))

Di sinilah letak pentingnya analisis yang lebih cermat. Daya beli rumah tangga tidak ditentukan hanya oleh satu angka inflasi agregat. Ia juga dipengaruhi oleh komposisi pengeluaran rumah tangga, sumber pendapatan, lokasi tempat tinggal, jenis pekerjaan, akses terhadap bantuan

sosial, dan keberadaan utang atau cicilan. Rumah tangga berpendapatan rendah biasanya lebih rentan terhadap kenaikan harga pangan, karena porsi belanja makan dalam total pengeluarannya lebih besar. Rumah tangga kelas menengah dapat mengalami tekanan berbeda: tidak jatuh miskin, tetapi mengalami stagnasi kualitas hidup, menunda pendidikan anak, mengurangi belanja kesehatan, atau mengubah pola tabungan dan investasinya. Laporan World Bank bahkan menyoroti bahwa pertumbuhan konsumsi riil kelas menengah Indonesia sejak 2019 relatif lemah, hanya sekitar 1,3 persen per tahun, dan 52 persen pekerjaan baru yang tercipta pada tahun terakhir berada di sektor bernilai tambah rendah. Ini memberi sinyal bahwa isu daya beli tidak semata masalah harga, tetapi juga masalah struktur pendapatan.

Makalah ini bertujuan menjelaskan bagaimana stabilitas inflasi memengaruhi daya beli rumah tangga di Indonesia, baik melalui mekanisme makroekonomi maupun melalui pengalaman konkret rumah tangga. Pembahasan disusun dalam beberapa bagian: kerangka konseptual inflasi dan daya beli; perkembangan inflasi Indonesia; saluran transmisi inflasi terhadap rumah tangga; implikasi berbeda menurut kelompok sosial-ekonomi; evaluasi kebijakan pengendalian inflasi; serta penutup yang merangkum pelajaran strategis bagi Indonesia. Dengan demikian, makalah ini tidak hanya memandang inflasi sebagai angka statistik, tetapi sebagai fenomena sosial-ekonomi yang membentuk keseharian keluarga Indonesia.

2. Kerangka Konseptual: Inflasi, Stabilitas Harga, dan Daya Beli

Secara konseptual, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu perekonomian. Definisi ini penting, sebab tidak setiap kenaikan harga tunggal dapat langsung disebut inflasi. Kenaikan harga cabai akibat musim hujan, misalnya, bisa bersifat lokal dan sementara; tetapi ketika kenaikan harga meluas ke banyak komoditas dan berlangsung cukup lama, barulah kita berbicara tentang inflasi. Dalam

praktik kebijakan di Indonesia, Bank Indonesia membedakan inflasi ke dalam beberapa komponen utama, yaitu inflasi inti, inflasi volatile food, dan inflasi administered prices. Inflasi volatile food terutama dipengaruhi gangguan pasokan dan kejutan pada komoditas pangan; inflasi administered prices dipengaruhi kebijakan pemerintah seperti tarif listrik, BBM bersubsidi, atau tarif angkutan; dan inflasi inti dipandang lebih mencerminkan kecenderungan inflasi jangka menengah. Bank Indonesia juga menjelaskan bahwa komponen volatile food dan administered prices mewakili sekitar 40 persen bobot keranjang IHK, sehingga guncangan pada sisi penawaran dapat berdampak besar terhadap inflasi headline. ([Bank Indonesia](#))

Dari perspektif teori makroekonomi, inflasi dapat muncul dari beberapa sumber. Pertama, inflasi tarikan permintaan muncul ketika permintaan agregat tumbuh lebih cepat daripada kapasitas produksi. Kedua, inflasi dorongan biaya terjadi ketika biaya produksi naik, misalnya akibat kenaikan harga energi, upah, atau bahan baku. Ketiga, terdapat inflasi yang bersumber dari ekspektasi: ketika rumah tangga dan pelaku usaha percaya harga akan naik, mereka menyesuaikan perilaku ekonomi—mempercepat konsumsi, menaikkan harga jual, atau meminta kenaikan upah—yang justru dapat mewujudkan inflasi itu sendiri. Keempat, dalam banyak negara berkembang, terdapat dimensi struktural: masalah distribusi, inefisiensi logistik, ketergantungan impor pangan atau energi, dan lemahnya cadangan dapat menjadikan inflasi lebih mudah melonjak walaupun permintaan tidak berlebihan.

Namun, yang paling menentukan bagi rumah tangga bukan hanya apakah inflasi ada atau tidak, melainkan apakah inflasi itu stabil. Inflasi yang rendah tetapi sangat fluktuatif bisa lebih merusak daripada inflasi yang sedikit lebih tinggi namun konsisten dan dapat diprediksi. Stabilitas memberi kepastian. Sebuah keluarga yang mengetahui harga kebutuhan pokok relatif terkendali akan lebih mudah mengatur pengeluaran pendidikan, kesehatan, ibadah, transportasi, dan tabungan. Sebaliknya, jika harga

berubah tajam dari bulan ke bulan, rumah tangga dipaksa hidup dalam mode defensif: menahan belanja, mengurangi kualitas konsumsi, menunda keputusan penting, atau berutang untuk menutup kebutuhan rutin.

Daya beli sendiri adalah kemampuan pendapatan nominal rumah tangga untuk membeli barang dan jasa. Karena itu, daya beli bersifat riil, bukan sekadar nominal. Pendapatan Rp5 juta per bulan memiliki arti yang berbeda ketika inflasi 2 persen dibanding ketika inflasi 8 persen. Bila harga naik lebih cepat daripada pendapatan, maka secara riil rumah tangga menjadi lebih miskin meskipun jumlah rupiahnya tampak sama atau bahkan naik sedikit. Di sinilah mengapa pembahasan mengenai upah nominal tanpa mempertimbangkan inflasi sering menyesatkan. Dalam pengalaman rumah tangga, yang dirasakan bukan besarnya gaji di atas kertas, tetapi apa yang dapat dibeli dari gaji tersebut.

Bagi Indonesia, hubungan antara inflasi dan daya beli juga harus dilihat dalam konteks struktur sosial. Masyarakat Indonesia sangat heterogen: rumah tangga miskin, rumah tangga rentan, kelas menengah baru, kelas menengah mapan, dan kelompok atas menghadapi pola konsumsi yang berbeda. Kenaikan harga beras, telur, minyak goreng, atau tarif listrik akan jauh lebih berat dirasakan rumah tangga yang sebagian besar pendapatannya digunakan untuk konsumsi dasar. Sementara itu, rumah tangga yang lebih sejahtera mungkin masih dapat menyesuaikan gaya hidup tanpa mengorbankan kebutuhan esensial. Karena itu, inflasi adalah fenomena agregat, tetapi dampaknya selalu asimetris.

3. Dinamika Inflasi Indonesia: Dari Pemulihan Menuju Kewaspadaan Baru

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menunjukkan kemampuan yang relatif baik dalam mengembalikan inflasi ke jalur sasaran setelah lonjakan 2022. Data Bank Indonesia menunjukkan inflasi aktual sebesar 5,51 persen pada 2022, lalu turun menjadi 2,61 persen pada 2023, 1,57 persen pada

2024, dan 2,92 persen pada 2025. Capaian 2025 ini masih berada dalam kisaran sasaran $2,5 \pm 1$ persen yang ditetapkan untuk 2025 dan 2026. Jika dilihat dari perspektif stabilitas makro, ini merupakan perkembangan penting. Ia menunjukkan bahwa koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan pengendalian inflasi pemerintah cukup efektif dalam mencegah inflasi tinggi yang persisten. ([Bank Indonesia](#))

Namun, stabilitas tersebut bukan alasan untuk lengah. Pada Januari 2026, inflasi tahunan tercatat 3,55 persen, dan pada Februari 2026 naik lagi menjadi 4,76 persen. Secara sekilas, angka ini dapat menimbulkan kesan bahwa Indonesia memasuki fase inflasi tinggi kembali. Akan tetapi, pembacaan yang lebih hati-hati menunjukkan bahwa lonjakan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan tekanan inflasi inti yang persisten. BPS mencatat inflasi Februari 2026 secara month-to-month sebesar 0,68 persen dan year-to-date baru 0,53 persen, sedangkan inflasi inti year-on-year berada pada 2,63 persen. Bank Indonesia menjelaskan bahwa inflasi headline 4,76 persen itu terutama dipengaruhi faktor temporer berupa base effect dari diskon tarif listrik rumah tangga 50 persen pada Januari dan Februari 2025, serta sebagian didorong kenaikan harga emas. Dengan kata lain, tidak semua lonjakan headline harus dibaca sebagai erosi fundamental daya beli yang permanen; sebagian adalah efek statistik perbandingan dengan basis harga yang sangat rendah pada tahun sebelumnya. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Di sisi lain, Bank Indonesia juga mengingatkan bahwa prospek inflasi 2026 tetap perlu diawasi karena adanya potensi kenaikan harga komoditas global, termasuk pangan dan pupuk. Inflasi volatile food pada Februari 2026 tercatat 4,64 persen secara tahunan, tetap terjaga tetapi menunjukkan adanya tekanan dari permintaan musiman dan gangguan cuaca. Ini penting bagi Indonesia, sebab inflasi pangan memiliki dimensi sosial yang lebih tajam dibanding inflasi umum. Ketika inflasi didorong oleh komoditas seperti beras, cabai, bawang, daging ayam, atau telur, dampaknya langsung dirasakan rumah tangga sehari-hari. Bahkan bila

inflasi inti tetap rendah, rumah tangga dapat tetap merasa “hidup makin mahal” karena yang naik justru barang yang paling sering dibeli. ([Bank Indonesia](#))

Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, kondisi ini mempunyai implikasi ganda. Di satu sisi, ekonomi Indonesia pada 2025 tumbuh 5,11 persen dan PDB per kapita mencapai Rp83,7 juta, menunjukkan fondasi pertumbuhan yang cukup baik. Di sisi lain, stabilitas pertumbuhan tidak otomatis berarti kesejahteraan rumah tangga meningkat merata. Jika pertumbuhan ekonomi tidak sepenuhnya diterjemahkan menjadi kenaikan pendapatan riil yang memadai, maka rumah tangga tetap dapat merasa tertekan. Hal ini sejalan dengan temuan World Bank bahwa konsumsi riil kelas menengah Indonesia bertumbuh lambat sejak pandemi. Karena itu, penilaian atas stabilitas inflasi harus selalu ditempatkan berdampingan dengan penilaian terhadap kualitas pertumbuhan pendapatan. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

4. Saluran Transmisi Inflasi terhadap Daya Beli Rumah Tangga

4.1. Kenaikan harga kebutuhan pokok

Saluran pertama dan paling langsung adalah harga kebutuhan dasar. Rumah tangga, khususnya kelompok miskin dan rentan, mengalokasikan porsi terbesar pengeluarannya untuk makan, energi rumah tangga, dan transportasi. Ketika harga beras, telur, minyak goreng, cabai, atau tarif listrik naik, ruang konsumsi lain segera menyempit. Mereka tidak lagi punya keleluasaan untuk menunda kebutuhan tersebut. Akibatnya, penyesuaian dilakukan pada pos lain: mengurangi protein, menunda pembelian pakaian, menghemat transportasi, atau menekan belanja pendidikan dan kesehatan yang justru penting bagi kualitas hidup jangka panjang.

Dalam konteks Indonesia, saluran ini menjadi sangat relevan karena inflasi volatile food dan administered prices memegang porsi besar dalam

keranjang IHK. Bank Indonesia mencatat bahwa komponen yang dipengaruhi shocks pasokan dan kebijakan harga pemerintah mencakup sekitar 40 persen bobot IHK. Artinya, stabilitas daya beli rumah tangga amat bergantung pada kemampuan negara mengelola pasokan pangan, logistik distribusi, dan penyesuaian harga-harga yang diatur pemerintah. Bila pengendalian hanya berfokus pada suku bunga tanpa memperbaiki sisi pasokan, maka perlindungan daya beli menjadi tidak lengkap. ([Bank Indonesia](#))

4.2. Erosi pendapatan riil

Saluran kedua adalah pendapatan riil. Sebuah rumah tangga tidak menilai kesejahteraannya berdasarkan pendapatan nominal semata, tetapi berdasarkan kemampuan pendapatan itu untuk mempertahankan pola konsumsi yang layak. BPS mencatat bahwa rata-rata upah buruh pada Februari 2025 sebesar Rp3,09 juta, naik 1,78 persen dibanding Februari 2024. Angka ini memberi petunjuk bahwa bantalan pendapatan formal tidak selalu tebal. Bila inflasi pada barang-barang penting naik lebih cepat daripada penyesuaian upah, maka daya beli turun bahkan ketika ekonomi secara agregat masih tumbuh. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Pada titik ini, rumah tangga biasanya menempuh salah satu dari tiga strategi. Pertama, mengurangi kuantitas konsumsi. Kedua, menurunkan kualitas barang yang dibeli, misalnya beralih ke produk yang lebih murah. Ketiga, menambah sumber pendapatan melalui pekerjaan tambahan, lembur, atau usaha kecil sampingan. Ketiga strategi ini menandakan bahwa inflasi tidak berhenti pada fenomena harga; ia mengubah perilaku ekonomi keluarga. Pada rumah tangga rentan, perubahan ini dapat berujung pada kelelahan kerja, penurunan kualitas gizi, atau berkurangnya investasi pada masa depan anak.

4.3. Ekspektasi dan psikologi ekonomi rumah tangga

Saluran ketiga adalah ekspektasi. Daya beli bukan hanya perkara angka pengeluaran saat ini, tetapi juga keyakinan rumah tangga tentang masa

depan. Ketika rumah tangga percaya harga akan terus naik, mereka cenderung menjadi lebih berhati-hati, mempercepat pembelian tertentu, atau sebaliknya menahan konsumsi non-esensial. Dalam jangka pendek, perilaku ini dapat mengubah pola permintaan. Dalam jangka lebih panjang, ia memengaruhi rasa aman ekonomi. Rumah tangga yang tidak yakin terhadap kestabilan harga cenderung kurang percaya diri untuk mengambil kredit produktif, membiayai pendidikan lanjutan, atau memperbesar usaha keluarga.

Fenomena ini juga terlihat pada kelas menengah. World Bank mencatat bahwa sejak 2019 hingga 2024, pertumbuhan konsumsi riil kelas menengah Indonesia hanya sekitar 1,3 persen per tahun, lebih rendah daripada kelompok termiskin maupun terkaya. Ini menunjukkan adanya kehati-hatian atau keterbatasan nyata dalam konsumsi. Dalam istilah sederhana, kelas menengah tidak runtuh, tetapi mereka “menahan napas”: tetap bekerja, tetap membayar cicilan, tetapi makin selektif membelanjakan uang. Secara sosial, keadaan ini penting karena kelas menengah biasanya menjadi penyangga utama permintaan domestik, pendidikan anak, kepemilikan rumah, dan investasi jangka menengah.

4.4. Beban cicilan, bunga, dan likuiditas rumah tangga

Saluran keempat berkaitan dengan biaya pembiayaan. Ketika inflasi meningkat dan perlu dikendalikan, otoritas moneter dapat menyesuaikan suku bunga. Walaupun pada Maret 2026 BI-Rate dipertahankan di 4,75 persen, Bank Indonesia menegaskan bahwa stabilitas nilai rupiah dan pengendalian inflasi tetap menjadi pertimbangan utama. Bagi rumah tangga, perubahan suku bunga memengaruhi cicilan kredit rumah, kendaraan, kartu kredit, dan pinjaman usaha mikro. Bila suku bunga atau standar kredit menjadi lebih ketat, ruang likuiditas rumah tangga menyempit. ([Bank Indonesia](#))

Bagi keluarga berpenghasilan tetap, cicilan yang stabil dapat membantu perencanaan. Tetapi bagi pekerja informal atau keluarga dengan pendapatan fluktuatif, kombinasi inflasi barang kebutuhan dan beban

utang yang kaku dapat menciptakan tekanan ganda. Uang belanja tergerus, tetapi kewajiban finansial tidak dapat ditunda. Dalam situasi ini, rumah tangga rentan beralih pada pinjaman jangka pendek yang lebih mahal, menjual aset, atau menunggak pembayaran. Sekali lagi, ini memperlihatkan bahwa inflasi bukan sekadar soal "harga naik", melainkan soal stabilitas seluruh neraca rumah tangga.

5. Implikasi Diferensial terhadap Kelompok Rumah Tangga

5.1. Rumah tangga miskin dan rentan

Kelompok yang paling rentan terhadap inflasi adalah rumah tangga miskin dan hampir miskin. Walaupun persentase penduduk miskin Indonesia pada September 2025 turun menjadi 8,25 persen, dengan 23,36 juta penduduk miskin, serta tingkat kemiskinan perdesaan 10,72 persen masih lebih tinggi daripada perkotaan 6,60 persen, angka-angka ini tidak berarti kerentanan telah hilang. Justru, mereka menunjukkan betapa besarnya kelompok masyarakat yang hidup dekat dengan garis kerentanan. Kenaikan harga pangan yang tampak kecil di tingkat nasional dapat mendorong sebagian rumah tangga rentan kembali jatuh ke bawah garis kemiskinan. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Bagi rumah tangga semacam ini, inflasi pangan memiliki dampak yang lebih besar daripada inflasi inti. Kenaikan harga beras atau minyak goreng tidak bisa direspons dengan penundaan seperti pembelian barang tahan lama. Mereka harus tetap makan, memasak, bepergian, dan menyalakan listrik. Karena itu, stabilitas inflasi bagi kelompok miskin sesungguhnya adalah stabilitas akses terhadap kebutuhan dasar. Dalam praktik sosial, ketika harga kebutuhan pokok naik, yang terpotong bukan hanya jumlah makanan, tetapi juga kualitas hidup: protein hewani dikurangi, pemeriksaan kesehatan ditunda, anak diberi uang saku lebih sedikit, dan kegiatan belajar terganggu.

5.2. Kelas menengah

Kelas menengah menghadapi ancaman yang berbeda. Mereka tidak selalu segera jatuh miskin ketika inflasi naik, tetapi mengalami erosi kemampuan untuk mempertahankan gaya hidup produktif dan aman. Mereka masih membayar sekolah anak, cicilan rumah, transportasi, internet, dan kebutuhan kesehatan. Namun, ruang untuk menabung, berinvestasi, atau mengembangkan keterampilan menjadi menyempit. Laporan World Bank bahwa pertumbuhan konsumsi riil kelas menengah Indonesia hanya 1,3 persen per tahun pada 2019–2024 menunjukkan adanya stagnasi yang halus tetapi nyata. Secara sosiologis, ini dapat melahirkan kecemasan ekonomi: orang bekerja keras tetapi merasa sulit maju.

Dalam narasi rumah tangga, tekanan kelas menengah sering tidak terlihat dalam statistik kemiskinan. Sebuah keluarga guru, pegawai swasta, atau pekerja profesional mungkin masih mampu membayar kewajiban utama, tetapi harus menunda penggantian kendaraan, menurunkan kualitas makanan, membatalkan liburan keluarga, atau menahan rencana pendidikan lanjutan. Daya beli mereka tidak runtuh seketika, melainkan menyusut perlahan. Itulah sebabnya stabilitas inflasi penting juga untuk menjaga vitalitas kelas menengah sebagai penggerak ekonomi domestik.

5.3. Rumah tangga perdesaan dan perkotaan

Dampak inflasi juga bersifat spasial. Rumah tangga perkotaan lebih sensitif terhadap tarif transportasi, sewa, dan biaya jasa; sedangkan rumah tangga perdesaan sering lebih sensitif terhadap harga pangan, pupuk, energi, dan biaya distribusi. Data BPS menunjukkan kemiskinan perdesaan masih lebih tinggi dibanding perkotaan pada September 2025. Ini menandakan bahwa kejutan harga di wilayah perdesaan dapat memiliki konsekuensi kesejahteraan yang lebih serius. Kenaikan biaya input pertanian atau terganggunya panen tidak hanya memengaruhi pendapatan produsen kecil, tetapi juga harga pangan bagi konsumen setempat. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Di sisi lain, rumah tangga perkotaan menghadapi inflasi gaya hidup dan layanan. Ketika biaya transportasi, pendidikan informal, internet, atau

makanan jadi naik, tekanan pada kelas pekerja perkotaan meningkat. Maka, strategi pengendalian inflasi nasional harus cukup fleksibel untuk membaca keragaman regional. Inflasi yang tampak terkendali secara nasional belum tentu berarti seluruh provinsi dan kabupaten/kota merasakan tekanan yang sama. BPS sendiri menunjukkan variasi inflasi antarprovinsi yang cukup lebar pada Februari 2026. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

5.4. Pekerja formal dan informal

Kelompok pekerja formal memiliki perlindungan relatif lebih baik bila ada mekanisme penyesuaian upah, tunjangan, atau kontrak jangka menengah. Sebaliknya, pekerja informal lebih rentan karena pendapatannya sering berubah-ubah dan tidak otomatis menyesuaikan inflasi. Seorang pedagang kecil, pengemudi, buruh harian, atau pekerja lepas dapat menghadapi situasi ketika biaya hidup naik lebih dulu, sementara pendapatan baru menyesuaikan belakangan—atau bahkan tidak menyesuaikan sama sekali. Dalam konteks ini, inflasi dapat memperbesar ketimpangan sosial karena mereka yang paling lemah di pasar kerja memiliki kemampuan paling kecil untuk mengalihkan beban kenaikan harga.

6. Stabilitas Inflasi sebagai Prasyarat Ketahanan Konsumsi Nasional

Hubungan antara inflasi dan daya beli rumah tangga pada akhirnya bermuara pada satu hal: ketahanan konsumsi nasional. Indonesia adalah ekonomi yang sangat ditopang permintaan domestik. Bila konsumsi rumah tangga melemah, maka efeknya menjalar ke perdagangan, manufaktur, jasa, UMKM, dan penerimaan negara. Karena itulah stabilitas inflasi tidak boleh dilihat hanya sebagai agenda bank sentral, melainkan agenda pembangunan nasional. Ketika harga terkendali, konsumsi rumah tangga lebih mantap; ketika konsumsi lebih mantap, dunia usaha lebih percaya diri; ketika usaha bergerak, pendapatan dan lapangan kerja lebih terjaga.

Data 2025 memperlihatkan hal ini dengan cukup jelas. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen, sementara konsumsi rumah tangga tetap menjadi

penopang utama dengan kontribusi sekitar 53,88 persen terhadap PDB dan pertumbuhan 4,95 persen. Secara inferensial, ini menunjukkan bahwa ketahanan konsumsi adalah jantung pertumbuhan Indonesia. Maka, bila inflasi tidak stabil dan daya beli tergerus, pertumbuhan ekonomi nasional pada akhirnya juga akan tertekan. Dengan kata lain, stabilitas harga bukan lawan pertumbuhan, tetapi syarat bagi pertumbuhan yang lebih berkelanjutan. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Pada titik ini, penting dibedakan antara inflasi yang “terlihat tinggi” karena faktor temporer dan inflasi yang “benar-benar merusak” karena bersifat persisten. Lonjakan inflasi tahunan Februari 2026 menjadi contoh baik. Bila hanya melihat headline 4,76 persen, orang mungkin menyimpulkan daya beli sedang jatuh tajam. Namun ketika dilihat lebih rinci, inflasi inti 2,63 persen dan inflasi tahun kalender 0,53 persen menunjukkan bahwa sebagian besar lonjakan berasal dari efek basis listrik dan beberapa komoditas tertentu. Ini tidak berarti rumah tangga tidak merasakan beban; tetapi secara analitis, kebijakan yang dibutuhkan mungkin bukan pengetatan agresif semata, melainkan kombinasi komunikasi kebijakan, stabilisasi pasokan, dan perlindungan kelompok rentan. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

7. Evaluasi Kebijakan Pengendalian Inflasi di Indonesia

7.1. Kebijakan moneter dan kredibilitas sasaran inflasi

Indonesia menggunakan kerangka sasaran inflasi, dan dalam kerangka ini kredibilitas sangat penting. Ketika publik percaya bahwa Bank Indonesia mampu menjaga inflasi dalam kisaran sasaran, ekspektasi harga menjadi lebih stabil. Hal ini membantu menahan perilaku ekonomi yang berlebihan, baik dalam penetapan harga maupun tuntutan upah. Data target dan realisasi menunjukkan bahwa setelah lonjakan 2022, Indonesia berhasil membawa inflasi kembali ke kisaran yang lebih terkendali pada 2023–2025. Kredibilitas semacam ini sangat berharga karena kebijakan moneter

bekerja bukan hanya melalui instrumen suku bunga, tetapi juga melalui kepercayaan publik terhadap otoritas. ([Bank Indonesia](#))

Namun, Bank Indonesia sendiri menegaskan bahwa kebijakan moneter memiliki keterbatasan ketika inflasi terutama berasal dari sisi penawaran atau kejutan harga. BI secara eksplisit menyatakan bahwa kebijakan moneter ditujukan untuk mengelola tekanan harga dari sisi permintaan agregat, bukan untuk langsung merespons kenaikan harga yang temporer akibat shocks seperti gagal panen, banjir, atau lonjakan harga energi. Di sinilah terlihat bahwa stabilitas inflasi di Indonesia tidak dapat diserahkan pada suku bunga saja. Dibutuhkan koordinasi lintas lembaga. ([Bank Indonesia](#))

7.2. Sinergi pusat-daerah dan pengendalian inflasi pangan

Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa pengendalian inflasi pangan memerlukan sinergi pusat-daerah. Bank Indonesia menekankan pentingnya koordinasi melalui TPIP dan TPID, serta berbagai program penguatan ketahanan pangan dan distribusi. Ini logis, sebab inflasi pangan sering muncul dari mata rantai yang sangat nyata: produksi terganggu cuaca, pasokan antardaerah tersendat, distribusi tidak lancar, cadangan tidak memadai, atau informasi pasar tidak berjalan baik. Inflasi semacam ini tidak cukup diatasi dengan menaikkan atau menahan suku bunga. Ia memerlukan perbaikan tata niaga dan logistik. ([Bank Indonesia](#))

Dalam praktik kebijakan, ini berarti stabilitas daya beli rumah tangga harus dibela sejak hulu. Produksi pangan perlu diperkuat, penyimpanan dan distribusi diperbaiki, konektivitas antardaerah dijaga, dan intervensi pasar dilakukan secara terukur. Bila suplai lancar, maka volatilitas harga pangan bisa diredam sebelum menjadi inflasi yang lebih luas. Bagi rumah tangga miskin dan rentan, keberhasilan di sisi ini jauh lebih berarti daripada sekadar penjelasan teknis bahwa inflasi sedang terkendali.

7.3. Perlindungan sosial dan indeksasi kebijakan

Kebijakan pengendalian inflasi juga perlu dilengkapi dengan perlindungan sosial yang adaptif. Ketika harga kebutuhan pokok naik, terutama pada kelompok pangan dan energi, rumah tangga miskin dan rentan memerlukan bantalan langsung. Bantuan sosial, subsidi yang tepat sasaran, program pangan, atau dukungan transportasi tertentu dapat menjadi penahan sementara agar daya beli tidak jatuh terlalu dalam. Karena kemiskinan Indonesia pada September 2025 masih 8,25 persen dengan jumlah 23,36 juta orang, ruang kebijakan ini tetap penting. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Lebih jauh, perlu dipikirkan indeksasi yang lebih cerdas. Banyak program bantuan atau transfer sosial memiliki nominal yang statis, padahal kebutuhan riil penerima berubah ketika harga meningkat. Jika nilai bantuan tidak menyesuaikan inflasi pada komoditas yang paling relevan bagi kelompok sasaran, maka perlindungan sosial kehilangan efektivitasnya. Dalam perspektif kebijakan publik, indeksasi parsial terhadap inflasi pangan atau wilayah tertentu dapat dipertimbangkan agar bantuan tetap riil, bukan sekadar nominal.

7.4. Pendapatan, pekerjaan berkualitas, dan stabilitas jangka panjang

Pada akhirnya, perlindungan daya beli tidak hanya dicapai dengan menekan inflasi, tetapi juga dengan memperkuat pendapatan rumah tangga. Temuan World Bank bahwa 52 persen pekerjaan baru berada di sektor bernilai tambah rendah serta lemahnya pertumbuhan konsumsi riil kelas menengah menunjukkan bahwa struktur pasar kerja turut menentukan seberapa tahan rumah tangga terhadap inflasi. Rumah tangga dengan pekerjaan produktif, pendapatan stabil, dan peluang mobilitas ekonomi akan lebih mampu menyerap guncangan harga daripada rumah tangga dengan pekerjaan informal berpendapatan rapuh.

Karena itu, strategi jangka panjang penguatan daya beli harus mencakup penciptaan pekerjaan berkualitas, peningkatan produktivitas, dan perluasan keterampilan. Inflasi yang stabil akan sangat membantu, tetapi tidak cukup bila pertumbuhan pendapatan riil tertahan terlalu lama. Sebuah ekonomi

dapat berhasil menjaga headline inflation di kisaran sasaran, tetapi tetap menghasilkan rasa stagnasi sosial apabila keluarga merasa sulit meningkatkan kualitas hidup.

8. Narasi Kasus: Bagaimana Inflasi Dirasakan di Tingkat Rumah Tangga

Untuk memahami lebih konkret, bayangkan tiga rumah tangga berbeda.

Rumah tangga pertama adalah keluarga buruh harian di pinggiran kota. Pendapatan keluarga ini tidak selalu tetap dari bulan ke bulan. Ketika harga beras, minyak goreng, dan gas naik, mereka tidak punya banyak pilihan selain mengurangi lauk atau menunda pembelian kebutuhan sekolah anak. Mereka jarang membaca data inflasi nasional, tetapi sangat peka terhadap harga pasar. Bagi keluarga seperti ini, stabilitas inflasi berarti kemampuan untuk tetap makan layak tanpa harus berutang di warung.

Rumah tangga kedua adalah keluarga kelas menengah muda di kota besar. Suami-istri bekerja, punya cicilan rumah, biaya internet, transportasi, dan pendidikan anak. Mereka tidak serta-merta jatuh miskin ketika inflasi naik, tetapi segera merasakan penyempitan ruang finansial. Rencana menabung untuk pendidikan anak tertunda, dana darurat sulit bertambah, dan mereka menjadi lebih cemas terhadap biaya hidup jangka panjang. Bagi keluarga ini, stabilitas inflasi berarti kepastian bahwa kerja keras mereka tidak diam-diam terkikis oleh harga yang naik lebih cepat daripada kualitas pendapatan.

Rumah tangga ketiga adalah keluarga petani kecil di desa. Secara teoritis mereka bisa diuntungkan jika harga hasil panen naik. Tetapi dalam kenyataan, mereka juga menghadapi kenaikan pupuk, ongkos angkut, dan risiko cuaca. Jika panen terganggu, mereka justru menanggung kerugian ganda: pendapatan turun, sementara harga kebutuhan rumah tangga ikut naik. Bagi keluarga ini, stabilitas inflasi berarti bukan hanya harga konsumen yang terkendali, tetapi juga biaya produksi yang tidak melonjak liar.

Narasi tiga rumah tangga ini menunjukkan bahwa stabilitas inflasi adalah konsep makro yang bermakna mikro. Di balik angka-angka nasional, terdapat keputusan harian tentang makan, sekolah, kesehatan, tabungan, dan martabat hidup.

9. Implikasi Strategis bagi Indonesia

Dari pembahasan di atas, ada beberapa implikasi strategis.

Pertama, sasaran inflasi harus dipertahankan bukan semata demi reputasi kebijakan moneter, melainkan demi perlindungan konsumsi rumah tangga sebagai fondasi pertumbuhan Indonesia. Bila konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari separuh PDB, maka menjaga daya beli berarti menjaga mesin utama ekonomi. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Kedua, pembacaan atas inflasi harus lebih berkualitas. Tidak semua kenaikan headline inflation memerlukan respons yang sama. Kasus Februari 2026 memperlihatkan bahwa penting membedakan antara efek basis, tekanan pangan musiman, dan inflasi inti yang lebih persisten. Kebijakan yang baik bukan yang paling keras, melainkan yang paling tepat membaca sumber tekanan harga. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Ketiga, inflasi pangan harus ditempatkan sebagai isu kesejahteraan, bukan semata statistik. Karena komponen pangan dan harga yang diatur pemerintah memiliki bobot besar dalam IHK, maka ketahanan pasokan, distribusi, dan intervensi pasar yang efektif merupakan bagian dari strategi perlindungan daya beli. ([Bank Indonesia](#))

Keempat, kebijakan anti-inflasi perlu berjalan seiring dengan kebijakan penguatan pendapatan. Tanpa perbaikan kualitas pekerjaan, produktivitas, dan upah riil, stabilitas harga tidak otomatis berubah menjadi perasaan aman ekonomi bagi rumah tangga. Stagnasi konsumsi riil kelas menengah adalah pengingat bahwa stabilitas makro perlu diterjemahkan ke dalam mobilitas sosial yang nyata.

Kelima, desain perlindungan sosial harus lebih adaptif terhadap gejolak harga. Rumah tangga miskin dan rentan membutuhkan bantalan yang responsif terhadap inflasi pada komoditas yang paling relevan dengan konsumsi mereka, terutama pangan. Ini penting agar penurunan kemiskinan yang telah dicapai tidak mudah terbalik ketika terjadi guncangan harga. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

10. Penutup

Stabilitas inflasi pada dasarnya adalah stabilitas kehidupan ekonomi rumah tangga. Dalam konteks Indonesia, maknanya menjadi semakin besar karena konsumsi rumah tangga merupakan pilar utama pertumbuhan nasional. Data mutakhir menunjukkan bahwa Indonesia berhasil menjaga inflasi 2025 pada 2,92 persen, masih dalam kisaran sasaran $2,5 \pm 1$ persen, di tengah pertumbuhan ekonomi 5,11 persen dan dominasi konsumsi rumah tangga sebesar 53,88 persen terhadap PDB. Ini adalah capaian yang penting. Akan tetapi, lonjakan inflasi tahunan Februari 2026 menjadi pengingat bahwa kestabilan harga tetap harus dijaga dengan kewaspadaan dan pembacaan yang cermat, sebab tekanan inflasi dapat muncul kembali dari efek basis, harga komoditas global, cuaca, dan distribusi pangan. ([Bank Indonesia](#))

Implikasi terhadap daya beli rumah tangga bersifat nyata dan berbeda-beda. Rumah tangga miskin paling tertekan oleh inflasi pangan; rumah tangga rentan dapat dengan cepat jatuh miskin kembali; kelas menengah mengalami stagnasi konsumsi riil dan penyempitan ruang finansial; pekerja informal menghadapi tekanan paling besar karena pendapatan mereka tidak otomatis menyesuaikan harga. Karena itu, inflasi tidak boleh dianalisis hanya sebagai persoalan agregat, melainkan sebagai persoalan distribusi dan keadilan ekonomi.

Makalah ini menegaskan bahwa strategi terbaik bagi Indonesia bukan hanya menurunkan inflasi, tetapi menjaga inflasi tetap stabil, dapat diprediksi, dan kompatibel dengan pertumbuhan pendapatan riil. Itu

berarti kebijakan moneter harus tetap kredibel; pengendalian pangan dan distribusi harus diperkuat; perlindungan sosial harus responsif; dan kualitas pekerjaan harus ditingkatkan. Hanya dengan kombinasi itulah stabilitas inflasi benar-benar berubah menjadi stabilitas daya beli, dan stabilitas daya beli berubah menjadi kesejahteraan rumah tangga yang lebih tahan terhadap gejolak.

Glosarium

Administered prices: Kelompok harga yang sangat dipengaruhi keputusan atau kebijakan pemerintah, seperti tarif listrik, BBM tertentu, dan tarif angkutan.

Base effect: Efek statistik yang muncul karena perbandingan dilakukan terhadap periode dasar yang sangat tinggi atau sangat rendah, sehingga perubahan tahunan dapat tampak melonjak atau turun tajam.

Daya beli: Kemampuan pendapatan nominal rumah tangga untuk membeli barang dan jasa secara riil.

Headline inflation: Inflasi umum yang tercermin pada keseluruhan indeks harga konsumen.

Inflasi inti: Komponen inflasi yang cenderung lebih stabil dan dianggap mencerminkan kecenderungan inflasi jangka menengah.

Inflasi persisten: Inflasi yang bertahan cukup lama dan tidak mudah hilang, biasanya berkaitan dengan ekspektasi, permintaan agregat, atau tekanan struktural.

Inflasi volatile food: Inflasi pada komoditas pangan yang mudah berfluktuasi karena musim, cuaca, distribusi, atau gangguan pasokan.

Indeks Harga Konsumen (IHK): Indeks yang mengukur perubahan harga rata-rata sekeranjang barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga.

Pendapatan nominal: Pendapatan dalam nilai uang saat ini, tanpa memperhitungkan perubahan harga.

Pendapatan riil: Pendapatan yang telah disesuaikan dengan inflasi, sehingga mencerminkan kemampuan beli yang sebenarnya.

Sasaran inflasi: Kisaran inflasi yang ditetapkan otoritas moneter sebagai acuan kebijakan.

Stabilitas harga: Kondisi ketika perubahan harga umum berlangsung rendah dan relatif dapat diprediksi.

TPIP/TPID: Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah, forum koordinasi antara pemerintah dan otoritas terkait untuk mengendalikan inflasi.

Upah riil: Nilai upah setelah dikoreksi oleh inflasi, sehingga menunjukkan kemampuan konsumsi yang sesungguhnya.

Daftar Pustaka (APA 7)

Badan Pusat Statistik. (2025, May 5). *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,76 persen. Rata-rata upah buruh sebesar 3,09 juta rupiah.*

Badan Pusat Statistik. (2026, February 5). *Ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh 5,11 persen.*

Badan Pusat Statistik. (2026, February 5). *Persentase penduduk miskin September 2025 turun menjadi 8,25 persen.*

Badan Pusat Statistik. (2026, March 2). *Inflasi year-on-year (y-on-y) pada Februari 2026 sebesar 4,76 persen.*

Blanchard, O. (2021). *Macroeconomics* (8th ed.). Pearson.

Fischer, S. (1993). The role of macroeconomic factors in growth. *Journal of Monetary Economics*, 32(3), 485–512.

Friedman, M. (1968). The role of monetary policy. *American Economic Review*, 58(1), 1–17.

Keynes, J. M. (1936). *The general theory of employment, interest and money*. Macmillan.

Bank Indonesia. (n.d.). *Inflasi*. Retrieved March 27, 2026.

Bank Indonesia. (n.d.). *Target inflasi*. Retrieved March 27, 2026.

Bank Indonesia. (2026, March 18). *BI-Rate tetap 4,75%: Mempertahankan stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi*.

World Bank. (2025). *A roadmap from homes to jobs to prosperity in Indonesia: Indonesia economic prospects*. World Bank.

Copilot for this article: ChatGPT 5.4. Thinking (2026). Access date: 27 March 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69c5f6e6-f7e4-839d-a23f-962e94f041a5>